

PERKEMBANGAN PERGURUAN TINGGI ISLAM DI INDONESIA

**A.Rezky Nurhidaya S¹; Azaz Akbar²; Ashar³;
Ince Prabu⁴; Syarifuddin Ondeng⁵**

^{1,3,4}Universitas Islam Makassar

²Universitas Muhammadiyah Buton

⁵Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail Correspondent: andirezkynurhidayahrere@yahoo.com

Abstrak

Perkembangan Perguruan tinggi Islam di Indonesia telah berlangsung sejak dibukanya Sekolah Tinggi Islam (STI) di Jakarta pada bulan Juli 1945 menjelang Indonesia merdeka. Sejak saat itu dinamika dan perkembangan perguruan Tinggi Islam dimulai. Setelah terbentuknya STI berubah menjadi UII (Universitas Islam Indonesia). Perkembangan berikutnya fakultas agama UII dinegerikan menjadi PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri), kemudian fase berikutnya muncullah IAIN dan STAIN, selain itu muncul pula pendidikan tinggi Islam swasta, baik berbentuk universitas, institut, maupun sekolah tinggi. Paradigma baru perguruan tinggi itu pada dasarnya bertumpu kepada tiga tungku utama, yakni Pertama, kemandirian lebih besar (greater autonomy) dalam pengelolaan atau otonomi. Kedua, akuntabilitas atau tanggung urai (greater accountability), bukan hanya dalam hal pemanfaatan sumber-sumber keuangan secara lebih bertanggungjawab, tetapi juga dalam pengembangan keilmuan, kandungan pendidikan dan program-program yang diselenggarakan. Ketiga, jaminan lebih besar terhadap kualitas (greater quality assurance) melalui evaluasi internal (internal evaluation) yang dilakukan secara kontinu dan berkesinambungan; dan evaluasi eksternal (external evaluation) oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN).

Kata Kunci: Akuntabilitas PTAI, Perguruan Tinggi; Sejarah pendidikan

THE DEVELOPMENT OF ISLAMIC UNIVERSITIES IN INDONESIA

Abstract

Muhammadiyah and NU are mainstream Islamic social organizations in Indonesia that were established before Indonesia's independence. These two organizations drive the renewal of Islamic thought, da'wah, social, health and education. KH. Ahmad Dahlan is a founder of Muhammadiyah. In the field of education, Muhammadiyah is modernizing Islamic education in Indonesia. By perfecting the Islamic education curriculum by incorporating Islamic religious education into public schools and secular knowledge into religious schools. The rise of Islam in Indonesia was also colored by the thoughts of KH. Hasyim Asy'ari, the founder of NU, which was different from KH. Ahmad Dahlan. The rise of KH.Hasyim Asy'ari's thinking is to want to maintain traditionalism, but also want changes for the better in Indonesian Islamic education.

The objectives of this study are 1) to examine the thoughts of KH. Ahmad Dahlan in the field of Islamic Education 2) to examine the thoughts of KH. Hasyim Asy'ari in the field of Islamic Education 3) to find out the relevance of KH. Ahmad Dahlan and KH. Hasyim Asy'ari on Islamic Education. The results of this study reveal that although they have different views, they have a relevant thought, namely hoping that Muslims will not only forgive in the religious sciences but also forgive in the general sciences. This can be seen from their efforts in addition to the religious sciences, they also include material from the profane sciences in the curriculum of the educational institutions they manage.

Keywords: Ahmad Dahlan; Kh. Hasyim Asy'ari; Islamic education

PENDAHULUAN

Perjalanan sejarah pendidikan di Indonesia menjadi diskursus yang tidak ada akhirnya. Dalam dimensi sejarah, terdapat tiga bagian yang selalu bergerak bagai roda kehidupan, yaitu masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Tinjauan sejarah juga terkadang menimbulkan persepsi yang parsial pada masyarakat bila dilahirkan dengan sejarah yang tidak objektif sehingga melahirkan informasi yang ambigu.

Zaman seperti ini kemajuan teknologi yang begitu pesat, arus globalisasi yang begitu hebat, sehingga orang terbius dalam arus tersebut, yang tidak menutup kemungkinan bahwa semua itu di samping ada dampak positifnya juga banyak dampak negatifnya sehingga masyarakat harus dapat mengantisipasi dari dampak negatif tersebut, budaya budaya asing yang telah memberikan bius yang sangat ampuh bagi bangsa ini dan dapat mengakibatkan efek yang sangat buruk bagi semua lapisan masyarakat, terutama generasi muda yang akan menggantikan posisinya sebagai penerus bangsa (Aminu, 2021).

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk membangun manusia seutuhnya. Pendidikan adalah suatu proses pencarian pengetahuan, keterampilan dan kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok individu dari satu generasi ke generasi berikutnya (Yahya, 2021). Modal sosial yang terbentuk seperti itu yang membangun fondasi dasar persyarikatan Muhammadiyah.

Peranan Muhammadiyah yang berpartisipasi dalam pembinaan Generasi muda Islam, adalah suatu hal yang sangat penting. Terlebih karena pionirnya, K.H. Ahmad Dahlan merupakan seorang ulama muda yang menaruh perhatian begitu besar bagi perkembangan generasi muda Islam, Pada tahun 1909 ia memasuki sebuah organisasi kaum muda Budi Utomo dengan harapan ia dapat memulai karirnya sebagai pengajar agama di sekolah-sekolah pemerintah (Rauf, 2018) .

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi dakwah memberikan pengaruh yang cukup besar dalam perkembangan pendidikan di Indonesia. Setidaknya bisa kita temukan fakta yang membuktikan argumentasi itu yaitu banyaknya Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) yang bergerak dalam dunia pendidikan. Media republika yang diterbitkan pada Jum'at 26 November 2021 menyebutkan muhammadiyah dan bisnisnya (AUM) terdapat

10.368 unit yang terdiri atas TK/PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, perguruan tinggi, rumah sakit, serta berbagai bisnis sosial lainnya (Alamsyah, 2019).

Banyak orang yang mengira, kebesaran jumlah Amal Usaha yang dimiliki persyarikatan itu karena sokongan dan sumbangan dana dari Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah (Pakkanna, 2021). Padahal PP Muhammadiyah hanya memberi sokongan moral, arah, orientasi, dan motivasi untuk melangkah sesuai koridor. Lebih dari itu, adanya aturan organisasi yang diputuskan bersama dan kepemimpinan kolektif-kolegial yang menjadi semen perekat pergerakan.

Para aktivis Muhammadiyah di tingkat akar rumput, misalnya di ranting atau cabang selalu terdoktrin untuk selalu berlomba-lomba demi kebaikan (*fastabiqul khaerat*). Maka, antara ranting dan cabang selalu ingin berlomba dan terobsesi membuat amal kebajikan. Tidak heran, jika Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) bertebaran di seantero negeri. Mulai dari sekolah (PAUD, TK, SD, SLTP, SLTA), Perguruan Tinggi, Rumah Sakit, Klinik, Panti Asuhan/Jompo, Rumah Singgah, Koperasi, Retail, Dana Pensiun, Persero, Jaringan Tani/Nelayan, Jaringan Usaha, Lazis, Wakaf, Hibah, dan seterusnya (Pakkanna, 2021).

Diskursus tentang sejarah panjang Muhammadiyah dalam membangun system pendidikan di Indonesia menjadi sesuatu yang menarik untuk terus dikaji, mengingat muhammadiyah mengambil peran yang besar dalam menjaga keutuhan NKRI melalui pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (*library research*). Apa yang disebut dengan riset kepustakaan atau sering juga disebut studi pustaka, ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Milya Sari, 2020). Adapun tahap-tahap yang harus ditempuh penulis dalam penelitian kepustakaan adalah sebagai berikut: *Pertama*, Mengumpulkan bahan-bahan penelitian dengan mencari kata kunci yang relevan dengan penelitian ini melalui jurnal penelitian juga berupa informasi atau data empirik yang bersumber dari buku-buku, hasil laporan penelitian resmi maupun ilmiah dan literatur lain yang mendukung tema penelitian ini. *Kedua*, membaca bahan kepustakaan. *Ketiga*, membuat catatan penelitian. Kegiatan mencatat bahan penelitian boleh dikatakan tahap yang paling penting dan barang kali juga merupakan puncak yang paling berat dari keseluruhan rangkaian penelitian kepustakaan. Karena pada akhirnya seluruh bahan yang telah dibaca harus ditarik sebuah kesimpulan dalam bentuk laporan. *Keempat*, mengolah catatan penelitian.

Subjek penelitian ini adalah Perguruan Tinggi Islam di Indonesia, sedang objeknya adalah Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena sumber data maupun hasil penelitian dalam penelitian kepustakaan (*library research*) berupa deskripsi kata-kata.

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari karya ilmiah yang diterbitkan baik dalam bentuk jurnal penelitian, prosiding maupun dalam karya skripsi, tesis, dan disertasi. Sedangkan data sekunder terdiri dari buku-buku yang relevan dengan bahan kajian dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Lahirnya STI

Dalam perang dunia II, ternyata Jepang berhasil merebut Indonesia dari tangan Belanda pada tahun 1942. Sementara Indonesia terseret dalam kancah peperangan tersebut. Penguasa Jepang (*Dai Nippon*) dengan segera mengeluarkan larangan bagi kegiatan-kegiatan pergerakan nasional Indonesia. Bahkan banyak pemimpin Indonesia yang direkrut untuk membantu administrasi pemerintahan Jepang (pemerintahan Jepang di Indonesia), antara lain adalah KHA Kahar Muzakir dan KH. Imam Zarkasyi. Gerakan perjuangan umat Islam Indonesia tak terlepas dari langkah Jepang untuk menutup gerakan kebangsaan. Partai-partai politik Islam dibubarkan kecuali MIAI. MIAI merupakan tempat bermusyawarah untuk kepentingan agama Islam dan dimaksudkan juga untuk tempat berkenalan, saling bertemu dan mejalin persahabatan agar dengan demikian dapat terwujud persatuan lahir dan batin di antara para alim ulama dan pemimpin Islam seluruh Indonesia.

MIAI ini pun pada tahun 1943 diubah namanya menjadi Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia, berarti Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia). Masyumi yang merupakan penjelmaan baru dari MIAI itu merupakan federasi dari empat organisasi-organisasi Islam yang oleh Jepang diizinkan hidup terus (sebagai organisasi sosial dan dakwah), yakni: Nahdlatul Ulama (NU), didirikan di Surabaya, Muhammadiyah (didirikan di Yogyakarta), Persatuan Oemat Islam Indonesia (POI), didirikan di Majalengka, Persatuan Umat Islam di Indonesia (PUII) didirikan di Sukabumi.

Berbeda dengan MIAI yang mendapatkan tekanan dari pihak Jepang sehingga tuntutannya untuk mendirikan PTI gagal, Masyumi lebih beruntung memiliki "kedekatan" dengan penguasa Jepang yang pada tahun-tahun terakhir pendudukannya memberi peluang bagi federasi ini terlihat secara intens dalam organ-organ politik yang diciptakannya. Wajar bila keputusan untuk mendirikan STI tidak mendapat hambatan seperti yang dialami MIAI.

Adanya larangan Jepang bagi kehidupan partai politik di Indonesia tidaklah menghilangkan cita-cita perjuangan umat Islam di Indonesia dalam bidang politik dan pendidikan. Dengan wadah Masyumi, meskipun menghadapi kerumitan dan tantangan berat, tokoh-tokoh umat Islam meneruskan perjuangan menurut kemampuan dan kemungkinan yang bisa dilakukan.

Bagi umat Islam, pembentukan Masyumi membawa berkah yang besar. Pada tataran ini sebenarnya Islam memiliki posisi sedang naik daun yang pasti mempengaruhi

perkembangan-perkembangan berikutnya sampai pada tingkat istimewa. Pada bulan April 1945, Masyumi segera menyelenggarakan pertemuan di Jakarta yang dihadiri oleh organisasi-organisasi Islam yang berfederasi (anggota Masyumi), kalangan intelektual dan ulama pemerintah. Nama-nama yang hadir mewakili unsur-unsur tersebut ikut mengambil keputusan lebih konkrit tentang rencana didirikannya STI.

1. PBNU: Abdul Wahab, Bisri Syansuri, Wahid Hasyim, Masykur, dan Zainal Arifin
2. PB Muhammadiyah: Ki Bagus Hadikusumo, Mas Mansur, Hasyim, Farid Ma'ruf, Mu'thi, M. Yunus Anis, dan Kertosudarmo
3. PB POI: A. Halim, dan H. Mansur
4. PB PUII: A. Sanusi dan Sumoatmojo
5. PB al-Islam: KH. Imam Ghazali
6. Shumubu: A. Kahar Muzakir, KH. A. Moh. Adnan, KH. Imam Zarkasi
7. Cendikiawan: Dr. Sukiman Wirdjosandojo, Dr. Satiman Wirdjosandojo, Wondoamiseno, Abukusno, Tjokrosujoso, Muh. Rum, dan lain-lain.

Melihat unsur-unsur yang hadir, forum musyawarah saat ini cukup representatif untuk melahirkan keputusan-keputusan yang bisa mencerminkan kehendak seluruh umat Islam Indonesia tanpa membedakan organisasi atau golongan.

Permusyawaratan tokoh-tokoh Islam yang disponsori oleh Masyumi bulan April tersebut betul-betul berhasil mengambil langkah maju untuk mewujudkan rencana mendirikan STI, yaitu dengan berhasilnya dibentuk panitia perencana STI di bawah pimpinan Moh. Hatta.

Dengan bantuan pemerintah Jepang, STI ini akhirnya dapat dibuka secara resmi pada tanggal 27 Rajab 1364 H, di saat peringatan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad saw, bertepatan dengan 8 Juli 1945 di Jakarta. Upacara peresmiannya diselenggarakan di gedung Kantor Imigrasi Pusat Gondangdia Jakarta.

Pada mulanya, STI didirikan untuk melatih ulama-ulama yang berpendidikan baik yaitu orang yang telah mempelajari Islam secara meluas dan mendalam, dan telah memperoleh standar pengetahuan umum yang memadai seperti dituntut oleh masyarakat sekarang ini. Hal ini sesuai dengan tujuan didirikannya STI yang pada dasarnya merupakan kebutuhan umat Islam Indonesia akan adanya Perguruan Tinggi yang memberikan pelajaran dan pendidikan tinggi tentang ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu agar menjadi peyiaran agama dan memberikan pengaruh Islam di Indonesia.

Menilik tujuan STI ini, jelas bahwa pemrakarsanya yang terdiri dari tokoh-tokoh reformis, politisi, ulama dan intelektual muslim berupaya mencari bentuk perpaduan pendidikan yang kelak diharapkan dapat melahirkan ulama yang pakar dalam dua bidang sekaligus mempelajari Islam secara luas dan mendalam dan memiliki kualifikasi ilmu-ilmu sekuler yang memadai.

Keputusan Masyumi untuk mendirikan STI itu dilatarbelakangi oleh beberapa hal, yaitu:

1. Kemerdekaan Indonesia kelak pasti meminta pengisian intelektual Islam, calon-calon pemimpin yang sanggup memimpin dan mengurus negara menggantikan pemerintah kolonial penerus generasi yang akan datang.
2. Diperlukan satu perguruan tinggi yang dapat menghimpun keserasian antara ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum, keseimbangan hidup duniawi dan ukhrawi.
3. Diperlukannya satu perguruan tinggi yang dimiliki oleh seluruh umat Islam yang berlandaskan ajaran-ajaran Islam dan merupakan wadah persatuan seluruh umat Islam dalam usaha menanggulangi pengaruh kehidupan Barat yang dibawa oleh penjajah.
4. Pengaruh kebangkitan nasional dan kebangkitan dunia Islam pada umumnya yang melahirkan gerakan-gerakan melawan penjajah dengan memakai sistem modern yang dimulai dengan berdirinya Serikat Dagang Islam (1904), Muhammadiyah (1912), Jam'iyatul Washliyah (1930), Persatuan Oelama (1915), Musyawarah Thalibin (1932) dan lain-lain.

Ada beberapa hal yang juga dilakukan oleh panitia perencana untuk melangkah lebih maju dalam pendirian STI, yakni melengkapi peraturan dan perangkat yang meliputi :

1. Untuk keperluan biaya penyelenggaraannya telah diperoleh bantuan uang dari Departemen Agama Dai Nippon sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).
2. Pelajaran-pelajaran yang akan diberikan di STI adalah meliputi ilmu-ilmu agama Islam dan kemasyarakatan yang mirip dengan rencana pelajaran pada fakultas yang Ushuluddin Universitas al-Azhar di Kairo.
3. Lamanya masa belajar di STI adalah 4 tahun yang dibagi ke dalam dua tingkatan, dua tahun memperoleh tingkat sarjana muda, ditambah dua tahun lagi memperoleh tingkat doktoral.
4. Untuk mendaftar dan menjadi mahasiswa dengan melalui test masuk adalah :
 - a. Tamatan AMS (*Algemene Middelbare School*), dan HBS (*Hogere Burger School*) 5 tahun.
 - b. Tamatan Madrasah Menengah Tinggi yang mempunyai pengetahuan umum setingkat dengan sekolah menengah umum.
5. Panitia ujian masuk bagi mahasiswa STI angkatan pertama dipimpin oleh KHA.Kahar Muzakir sebagai Rektor Magnificus. Waktu itu tercatat 78 orang yang mendaftar, namun yang dinyatakan lulus tes oleh panitia penguji hanya sebanyak 14 orang, yakni 11 orang dari sekolah Menengah Umum dan tiga dari sekolah Madrasah menengah. Sisanya (yang tidak lulus) sebanyak 64 orang yang diterima dan disalurkan (terlebuah dahulu) untuk masuk tingkat pendahuluan dari STI, yakni satu tingkat persiapan SLTA (setingkat dengan kelas terakhir SLTA) untuk dapat diterima menjadi mahasiswa. Tingkat pendahuluan STI tersebut dibagi dua kelompok, yakni :
 - a. Kelompok A, ialah mereka berasal (dan berijazah) SLTA untuk diberi plajaran agama dan bahasa Arab.

- b. Kelompok B, ialah mereka yang berijazah Madrasah Menengah Tinggi untuk diberi pelajaran ilmu umum.

Mengenai karir di masa depan, para lulusan STI ini dapat menduduki jabatan, antara lain:

1. Sebagai guru agama pada berbagai macam sekolah
2. Pejabat pada Peradilan Agama
3. Sebagai Pegawai Negeri dan Dinas Keagamaan

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 yang berbarengan dengan itu tokoh-tokoh pendiri STI terlibat langsung pula dalam kancah perjuangan kemerdekaan RI. Beserta dengan itu pula munculnya agresi Belanda ke Indonesia untuk kembali menjadikan Indonesia bagian dari negeri jajahan mereka, maka ibu kota Negeri RI dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Dengan pindahanya Pemerintah RI ke Yogyakarta, maka STI pun ikut pindah.

Pada tanggal 10 April 1946 STI dibuka kembali di Yogyakarta dengan dihadiri oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta. Dalam acara tersebut Moh. Hatta menyampaikan pidato yang berjudul "Sifat Sekolah Tinggi Islam". Sedangkan KH. Hadjid menyampaikan pidato (kuliah umum) tentang Ilmu Tauhid.

Demikian STI terus berjalan di Yogyakarta pada tahun 1946 dan tahun 1947 dengan agak kurang lancar karena waktu itu bangsa Indonesia sedang berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan, apalagi hampir warga akademika STI ikut memanggul senjata melawan penjajah yang hendak kembali. Sekalipun ada gangguan sehingga perkuliahan tidak lancar, namun pada akhir tahun 1946/1947 masih sempat menyelenggarakan dua kali ujian untuk tingkat pendahuluan. Pihak pemerintah dalam keadaan seperti itu masih memberikan perhatian cukup baik bagi STI. Terbukti pada tahun 1947 Kementrian Agama RI memberikan bantuan uang sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah). Rencana pelajaran yang ada waktu itu sama seperti ketika di Jakarta.

B. STI Diubah Menjadi UII

Pada bulan November 1947, STI dikembangkan menjadi Universitas Islam Indonesia (UII) mengasuh empat fakultas yaitu agama, hukum, pendidikan dan ekonomi yang dibuka secara resmi pada tanggal 10 Maret 1948 bertepatan dengan 27 Rajab 1367 H. Perkembangan berikutnya adalah Fakultas Agama Universitas Islam Indonesia dinegerikan menjadi Perguruan Tinggi Islam Negeri (PTAIN).

Panitia perbaikan STI menjadi UII adalah KHR. Fatchurrahman Kafrawi, KH.Faried Ma'roef, KH. Malikus Suparto, Sulaiman, Mr. R. Sunandjo, Drs. A.Sigit, KHA. Kahar Muzakkir, Ustaz Sulaiman, Ustaz Husein Jahja, dan Kartosudarmo.

Untuk memulai secara resmi mengubah STI menjadi UII pada bulan Maret 1948 diadakanlah upacara pembukaan pendahuluan yakni pembukaan kelas pendahuluan di

Yogyakarta. Setelah tingkat pendahuluan resmi dibuka maka berarti segala sesuatu yang diperlukan telah dipersiapkan untuk segera meresmikan perubahan STI menjadi UII. Acara penting yang disajikan pada upacara pembukaan UII adalah pembacaan Keputusan Dewan Pengurus tentang berdirinya UII, juga pidato oleh KHA. Kahar Muzakir, dan Dr. Mr. Kusumah Atmaja.

Dengan demikian UII berpusat pada Yogyakarta sekarang adalah UII yang merupakan kelanjutan dan pengganti dari STI yang dibuka pertama kali di Jakarta tanggal 27 Rajab 1361 H atau 8 Juli 1945.

Dengan perubahan STI menjadi UII ini, tujuan yang semula dimaksudkan untuk memberikan pendidikan yang baik bagi para calon ulama, akhirnya bergeser titik beratnya pada fakultas-fakultas non-agama yang bersifat sekuler meskipun tetap berlandaskan agama dan semangat keagamaan. Perubahan orientasi ini bukan tanpa alasan. Kehadiran sebuah perguruan tinggi swasta non-Islam di Yogyakarta yang didirikan pada bulan Maret 1948 dan berkembang menjadi Universitas Gajah Mada (UGM) sejak tanggal 19 Desember 1949 memperoleh corak nasional. bukan tidak mungkin UGM ini menjadi saingan yang berat bagi UII.

Perubahan orientasi dalam UII ini berarti UII harus berkompetisi dengan universitas lain yang secara ideologis berbeda. UII bercorak keislaman, sedangkan UGM bercorak nasionalis. Pembukaan fakultas-fakultas sekuler merupakan suatu keharusan (kebutuhan) zaman spesialisasi ilmu menjadi tak terhindarkan. Ilmu-ilmu dalam Islam jelas tidak hanya menyangkut ilmu-ilmu agama tetapi termasuk ilmu-ilmu umum. UII jelas dengan penuh kesadaran melakukan perubahan-perubahan ini. Perubahan itu tidak keluar dari tujuan pengembangan ilmu yang hendak dicapai STI, yaitu memadukan ilmu agama dan ilmu umum dalam suatu universitas yang mencakup ilmu-ilmu Islam.

Sampai tahun 1950, UII merupakan satu-satunya perguruan tinggi yang dimiliki oleh umat Islam Indonesia dan cikal bakal lahirnya perguruan tinggi Islam di Indonesia pada tahun-tahun berikutnya. Dampak ikutan kehadiran UII ini secara kelembagaan mulai menggema pada tahun 1950-1960 yang ditandai dengan berdirinya PTIS (perguruan Tinggi Swasta) di berbagai kota.

C. Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN)

PTAIN ini diresmikan pada tanggal 26 September 1951 dihadiri oleh Menteri Agama RI A. Wahid Hasyim. Penyelenggaraan PTAIN selanjutnya diatur dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri PP&K tertanggal 21 Oktober 1951 yang ditandatangani oleh A. Wahid Hasyim dan Mr. Wongsonegoro.

Sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, kemudian juga didirikan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA) di Jakarta pada tanggal 1 Juni 1957, dengan visi : "Guna mendidik dan mempersiapkan pegawai negeri yang akan mencapai ijazah pendidikan semi-akademi dan akademi untuk dijadikan ahli-didik agama pada sekolah-sekolah lanjutan, baik umum, maupun kejuruan dan agama".

D. Kelahiran IAIN

Perkembangan PTI tidak berhenti di situ, setelah memperhatikan situasi sosial kemasyarakatan waktu itu, PTAIN dan ADIA akhirnya dilebur menjadi satu lembaga PTI dengan nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang diresmikan pada tanggal 24 Agustus 1960 di Yogyakarta.

Ada beberapa hal yang menarik untuk dicermati dari perjalanan sejarah Visi Akademik PTI di atas. Pada proses awal, terutama ketika STI, maka Visi Akademik mencakup dua hal: ilmu dan agama (*science and religion*) atau ilmu agama dan ilmu umum (*religious and secular sciences*), walau dalam praktiknya, ilmu agama lebih dominan karena berorientasi ke Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar.

Setelah STI menjadi UII, maka ada sedikit pergeseran, jika semula penekanannya pada ilmu agama kemudian berubah penekanannya pada ilmu umum. Setelah berdirinya PTAIN dan ADIA dan kemudian menjadi IAIN, maka Visi Akademik lebih terfokus pada pengembangan ilmu agama. Bahkan secara tegas disebutkan bahwa perguruan tinggi itu berkiblat pada Universitas Al-Azhar Mesir.

Sejak saat itu, PTI mengkhususkan kajiannya pada ilmu agama (dalam arti sempit) dan sekaligus menjadi bagian atau di bawah naungan Departemen Agama. Sedangkan Perguruan Tinggi Umum (seperti UGM) berada di bawah naungan Departemen Pendidikan. Dengan kata lain, dikotomi ilmu agama dan ilmu umum terefleksi juga dengan keberadaan Departemen Agama dan Departemen Pendidikan, dan inilah fenomena umum di hampir seluruh dunia Islam sejak masa penjajahan Barat.

Namun keadaan ini mulai beranjak berubah memasuki akhir tahun 1990-an atau awal tahun 2000-an. Pada masa ini diperkenalkan istilah “IAIN *with wider-mandate*”, atau “IAIN dengan mandat yang diperluas”. Sejak itu, IAIN yang semula berkonsentrasi pada ilmu agama mulai merambah bidang-bidang studi yang selama ini dikenal dengan ilmu umum.

Lahirnya Jurusan Tadris di Fakultas Tarbiyah menjadi contoh amat jelas dalam hal ini. Visi dan orientasi akademik yang baru ini bisa dilihat misalnya, pada Statuta IAIN Sunan Kalijaga tahun 2001. Dalam pasal 3 disebutkan bahwa: “Terwujudnya warga masyarakat yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, dan memiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan, serta mempunyai kemampuan akademik dan/atau profesional yang mampu menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu agama Islam dan ilmu lain yang terkait, dan menyebarkanluaskannya dengan menghargai nilai kemanusiaan untuk meningkatkan harkat dan kehidupan masyarakat, dan memperkaya kebudayaan nasional dan umat manusia”.

Melalui Visi Akademik ini jelas bahwa IAIN merupakan PTI yang konsentrasi pada ilmu agama tetapi sudah mulai memberi perhatian pada ilmu umum yang dalam statuta tersebut disebut dengan kalimat “ilmu lain yang terkait”. Kecenderungan ini bukan monopoli IAIN Sunan Kalijaga tetapi juga menjadi visi akademik sejumlah IAIN lainnya.

E. Kemunculan Universitas Islam Negeri (UIN)

Perubahan relatif fundamental mulai muncul dengan lahirnya Universitas Islam Negeri (UIN). UIN ini merupakan hasil transformasi IAIN yang secara kelembagaan berupa Institut menjadi Universitas. Hingga kini telah terdapat 17 UIN dan 23 IAIN.

Sebagai sebuah lembaga Universitas, UIN tidak lagi seperti IAIN. Universitas tersebut tidak hanya menekuni ilmu agama tetapi juga ilmu umum. Prodi-Prodi ilmu agama berada di bawah naungan Departemen Agama, sementara prodi-prodi umum berada di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional.

Perkembangan ini menarik untuk dicermati, karena memberi gambaran semakin jelas pentingnya “pendidikan satu atap” yang sudah didengungkan sejak lama oleh sejumlah pakar pendidikan di Indonesia. Apabila Pemerintah sudah berhasil menjadikan “satu atap” Peradilan Agama dengan Peradilan Umum (juga peradilan lainnya), maka tinggal diteruskan ke arah “pendidikan satu atap”. Sehingga dapat terhindar dari kebingungan birokrasi sebagaimana dialami selama ini. Perkembangan terakhir dari PTI yang berupa UIN tersebut bukan merupakan perkembangan sesaat dan tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari pergulatan panjang umat Islam di Indonesia.

Kota Yogyakarta sebagai kota perjuangan dan pusat Pemerintahan Republik Indonesia diberi penghargaan dengan menetapkan kota Yogyakarta sebagai kota universitas. Berkenaan dengan itu didirikanlah di Yogyakarta Universitas Gajah Mada yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1950 tertanggal 14 Agustus 1950 yang ditandatangani oleh Assat selaku Pemangku jabatan Presiden Republik Indonesia. Sehubungan dengan itu pula kepada umat Islam diberikan pemerintah pula Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang dinegerikan dari Fakultas Agama Universitas Islam Indonesia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1950. Sedangkan peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan No.K/I/14641 tahun 1951 (Agama) dan No. 28665/Kab.Tahun 1951 (Pendidikan tertanggal 1 September 1951). Tujuan PTAIN adalah untuk memberi pengajaran tinggi dan menjadi pusat memperkembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang agama Islam. Tujuan Praktis dari PTAIN adalah untuk memenuhi dan mengatasi kekurangan tenaga ahli dalam bidang ilmu agama Islam.

PTAIN mulai beroperasi secara praktis pada tahun 1951. Dimulailah perkuliahan perdana pada tahun tersebut dengan jumlah mahasiswa 67 orang dan 28 orang siswa persiapan dengan pimpinan fakultasnya KH. Adnan. PTAIN ini mempunyai jurusan Tarbiyah, Qadha, dan Dakwah. Mata pelajarannya didampingi oleh mata pelajaran umum terutama yang berkenaan dengan jurusannya. Contohnya, Jurusan Tarbiyah memerlukan pengetahuan umum mengenai ilmu pendidikan, begitu juga pada jurusan lainnya, diberikan pula pengetahuan umum yang sesuai dengan jurusannya.

Penergian fakultas agama UII menjadi PTAIN, dianggap sebagai bentuk penghargaan negara atas Islam. Tujuan dibentuknya PTAIN adalah untuk mengatasi kekurangan tenaga ahli dalam bidang ilmu agama Islam yang sangat diperlukan baik oleh

pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Tidak adanya lembaga pendidikan tinggi bidang ilmu agama di Indonesia mengakibatkan para lulusan madrasah dan pesantren selama kurun waktu yang lama melanjutkan studinya ke lembaga-lembaga pendidikan tinggi agama di Timur Tengah, Makkah maupun Kairo. PTAIN dalam sudut pandang ini diharapkan dapat menjadi pusat untuk mengembangkan dan memperdalam ilmu tersebut. Mempertinggi taraf pendidikan dalam bidang agama dan ilmu pengetahuan berarti mempertinggi taraf kehidupan bangsa Indonesia dalam lapangan kerohanian (spiritualitas) maupun intelektualisme.

Ditinjau dari kerangka yang lebih luas dan dari sudut pandang kaum muslimin, pengambil-alihan fakultas agama UII oleh pemerintah (Kementerian Agama) yang kemudian menjadi PTAIN dapat dipandang positif karena dengan cara ini pemerintah dapat berbuat lebih banyak bagi kemajuan umat Islam dibandingkan dengan apa yang dapat dilakukan oleh universitas swasta.

PENUTUP

Pecahnya Perang Dunia II, yakni Jepang berhasil mengalahkan Belanda yang akhirnya Jepang yang berkuasa di Indonesia. Jepang tidak mengizinkan adanya MIAI, tetapi menggantinya dengan Masyumi (Majelis syuro Muslimin Indonesia) yang berdiri tahun 1943. Penggantian MIAI dengan Masyumi ini memberi arti bahwa Jepang tidak menyukai banyaknya organisasi-organisasi Islam di Indonesia yang dianggap sebagai penghambat Jepang dalam mewujudkan keinginannya menguasai Indonesia. Bagi umat Islam dibubarkannya MIAI dan digantikan dengan Masyumi tidaklah menghambat keinginan mereka untuk mendirikan PTI. Beberapa organisasi yang diizinkan berdiri oleh Jepang bersatu untuk memajukan umat Islam. Para pejabat-pejabat yang bergabung dalam organisasi bermusyawara, dan menunjuk panitia untuk mendirikan STI (Sekolah Tinggi Islam). Setelah pembentukan panitia dan dengan bantuan Jepang, akhirnya STI dapat didirikan dan resmi dibuka pada tanggal 27 Rajab 1364 yang bertepatan dengan tanggal 8 Juli 1945. Acara peresmian di Kantor Imigrasi Pusat, Gondangdia, Jakarta.

Setelah 40 hari STI dibuka, Belanda ingin kembali menjajah Indonesia yang menyebabkan peperangan. Melihat hal ini, rakyat Indonesia merasa tidak mungkin untuk melanjutkan perkuliahan lagi di Jakarta karena tidak aman. Akhirnya STI dipindahkan ke Yogyakarta yang resmi dibuka pada tanggal 10 April 1946 (27 Rajab 1365).

Kemudian untuk memperluas lagi pendidikan di tingkat perguruan tinggi, muncullah ide untuk merubah STI menjadi UII yang terdiri dari 4 fakultas yaitu agama, hukum, pendidikan dan ekonomi. Dengan dirubanya STI menjadi UII, diharapkan umat Islam mampu untuk menjadi seseorang yang memiliki pengetahuan yang luas tentang pendidikan agama dan juga memiliki pengetahuan yang luas tentang pendidikan umum. Pada tanggal 12 Agustus 1950 fakultas agama yang ada di UII dinegerikan oleh pemerintah menjadi PTAIN (Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri).

DAFTAR PUSTAKA

- Hasbullah. Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- HS Marzuki dan Marzuki. Perguruan Tinggi Agama Islam Indonesia: Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya, Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- Munthoha, et.al. Pemikiran dan Peradaban, Jogjakarta: UII Press, 1998.
- Putra Daulay, Haidar. Dinamika Pendidikan Islam di Asia Tenggara, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- _____. Pendidikan Islam: Dalam Sistem Pendidikan Nasional, Jakarta: Kencana, 2004.
- _____. Sejarah Pertumbuhan Pembaruan pendidikan Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2007.
- I.N, Soebagijo. K.H.Mansur: Pembaharuan Islam Indonesia, Jakarta: Gunung Agung, 1981.